



Analisis Strategi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Dalam Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Desa Sumberejo, Kabupaten Wonogiri, Wilayah Kerja BPDAS Solo

Mita Nur Hidayati^{1*}, Aziz Akbar Mukasyaf¹, Danardono¹, Afif Ari Wibowo¹

¹ Program Studi Geografi, Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia.

DOI: <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v7i3.2325>

Article Info:

Received : 16 Juni 2026
Revised : 27 Juni 2026
Accepted : 01 Juli 2026
Published : 05 Juli 2026

Correspondence:

Mita Nur Hidayati

Phone: +6285893793221

Abstract: The success of the Forest and Land Rehabilitation (RHL) Program is influenced by the level of community participation and institutional capacity at each stage of implementation. This study aims to analyze the level of community institutional participation, identify internal and external factors affecting these institutions, and formulate strategies to strengthen community institutions within the RHL Program in Sumberejo Village, Wonogiri Regency (under the jurisdiction of BPDAS Solo). A descriptive approach employing both quantitative and qualitative methods was used. Data were collected through observation, interviews, questionnaires, and document review involving 40 members of the Forest Farmer Group selected via random sampling, while key informants were chosen through purposive sampling. Data analysis utilized a Likert scale, IFAS-EFAS matrices, and SWOT analysis. The results indicate that community institutional participation falls into the "high" category during the implementation (79.37%) and output utilization (81.37%) stages, whereas the planning (63.12%) and evaluation (54.75%) stages fall into the "moderate" category. Identification results reveal that member engagement, group cooperation, and group leadership are key strengths, while limited knowledge regarding rehabilitation and group management remains a weakness. Externally, government support, facilitation, and the availability of rehabilitation land represent major opportunities, despite challenges posed by unpredictable weather and pest infestations. These conditions place the community institutions in Quadrant I; consequently, an SO (Strengths-Opportunities) strategy is prioritized to bolster participation, group cooperation, and the utilization of government support, thereby ensuring the sustainability of the RHL Program.

Keywords: Community Participation; Community Institutions; Forest and Land Rehabilitation; SWOT; Strengthening Strategy.

Citation: Hidayati, M. N., Mukasyaf, A. A., Danardono, & Wibowo, A. A. (2026). Analisis Strategi Penguatan Kelembagaan Masyarakat Dalam Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Desa Sumberejo, Kabupaten Wonogiri, Wilayah Kerja BPDAS Solo. *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, Dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)*, 7(3), 3129–3139. <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v7i3.2325>

Pendahuluan

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) merupakan kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk memulihkan kawasan hutan dan lahan yang mengalami penurunan kualitas akibat tekanan aktivitas manusia maupun proses alami. Implementasi RHL didukung melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) sebagai langkah untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan sekaligus memperbaiki kualitas

lingkungan. Selain berorientasi pada perbaikan kondisi biofisik, Program RHL juga bertujuan mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kawasan hutan. Selain bertujuan memulihkan tutupan vegetasi, rehabilitasi hutan dan lahan juga berfungsi mengendalikan erosi, meningkatkan infiltrasi air, serta menjaga produktivitas lahan sehingga konservasi tanah

dan air dapat berlangsung secara berkelanjutan (Arsyad, 2010). Upaya rehabilitasi hingga kini menjadi kebutuhan yang mendesak karena Kementerian Kehutanan pada tahun 2025 melaporkan bahwa Indonesia masih ada sekitar 12,4 juta hektare lahan kritis yang memerlukan penanganan melalui kegiatan rehabilitasi. Besarnya luasan tersebut menunjukkan bahwa degradasi hutan dan lahan masih menjadi tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga pelaksanaan Program RHL perlu terus diperkuat untuk memulihkan fungsi ekologis kawasan secara berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan Program RHL tidak semata-mata ditentukan oleh aspek teknis penanaman, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan masyarakat pada seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan. Menurut Cohen dan Uphoff (1980), partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Partisipasi masyarakat pada setiap tahapan mampu menumbuhkan rasa memiliki terhadap program sehingga keberlanjutan hasil rehabilitasi lebih mudah dipertahankan. Meskipun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat belum merata pada setiap tahapan kegiatan. Purwanti dkk. (2022) melaporkan bahwa partisipasi masyarakat cenderung lebih tinggi di tahap pelaksanaan daripada tahap perencanaan dan evaluasi. Sementara itu, Ohiwal dkk. (2023) menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan masyarakat berperan penting dalam menjaga keberlanjutan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penguatan kelembagaan masyarakat masih menjadi kebutuhan untuk meningkatkan kualitas partisipasi dalam Program RHL.

Partisipasi masyarakat dalam Program RHL umumnya difasilitasi melalui kelembagaan lokal, salah satunya Kelompok Tani Hutan (KTH). KTH berperan sebagai wadah masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan rehabilitasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, hingga evaluasi. Efektivitas peran kelembagaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai aspek, antara lain koordinasi antaranggota, kepemimpinan kelompok, pengelolaan organisasi, kapasitas anggota, serta pendampingan dari instansi terkait. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kelemahan pada aspek-aspek tersebut dapat menghambat pelaksanaan Program RHL sehingga penguatan kapasitas kelembagaan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan. Keberhasilan pengelolaan sumber daya alam juga dipengaruhi oleh kelembagaan yang mampu mengatur pembagian peran, koordinasi, serta kerja sama

antaranggota dalam mencapai tujuan bersama (Kartodihardjo, 2013).

Kabupaten Wonogiri termasuk salah satu wilayah yang memiliki kerentanan terhadap degradasi lahan akibat kondisi topografi dan karakteristik pemanfaatan lahannya (Kartodihardjo, 2013). Salah satu lokasi pelaksanaan Program RHL berada di Desa Sumberejo yang termasuk dalam wilayah kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Solo. Program tersebut melibatkan Kelompok Tani Hutan sebagai kelembagaan masyarakat yang berperan dalam berbagai tahapan kegiatan rehabilitasi. Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa masyarakat telah terlibat dalam kegiatan pembuatan teras batu, penanaman tanaman kehutanan dan tanaman buah, serta pemeliharaan tanaman. Namun demikian, penguatan kapasitas kelembagaan masih diperlukan supaya pelaksanaan Program RHL dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji partisipasi masyarakat maupun kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan Program RHL. Namun, ada beberapa penelitian masih membahas kedua aspek tersebut secara terpisah sehingga belum memberikan gambaran mengenai keterkaitan antara tingkat partisipasi masyarakat, kondisi internal dan eksternal kelembagaan, serta strategi penguatan kelembagaan yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan Program RHL. Selain itu, kajian mengenai strategi penguatan kelembagaan masyarakat pada pelaksanaan Program RHL di Desa Sumberejo, Kabupaten Wonogiri, juga masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pendekatan yang mengintegrasikan analisis tingkat partisipasi masyarakat, identifikasi faktor internal dan eksternal kelembagaan melalui analisis IFAS dan EFAS, serta penyusunan strategi penguatan kelembagaan menggunakan analisis SWOT sebagai dasar penyusunan rekomendasi dalam mendukung keberhasilan Program RHL.

Penelitian ini bertujuan menganalisis partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Sumberejo, Kabupaten Wonogiri, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan Program RHL, serta merumuskan strategi penguatan kelembagaan masyarakat untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah kerja BPDAS Solo.

Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif dengan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat serta merumuskan strategi penguatan kelembagaan

masyarakat dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Desa Sumberejo, Kabupaten Wonogiri (Sugiyono, 2019). Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi masyarakat, sedangkan pendekatan kualitatif dimanfaatkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi penguatan kelembagaan masyarakat.

Populasi penelitian meliputi anggota Kelompok Tani Hutan (KTH), aparat Pemerintah Desa Sumberejo, dan pendamping Program RHL dari BPDAS Solo. Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling, sedangkan responden anggota KTH dipilih menggunakan teknik random sampling sebanyak 40 orang yang mewakili delapan Kelompok Tani Hutan di Desa Sumberejo (Sugiyono, 2019). Data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen instansi terkait serta berbagai sumber pustaka yang relevan.

Instrumen penelitian berupa kuesioner disusun dengan mengacu pada indikator partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff (1980), yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Sementara itu, observasi dan wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai

pelaksanaan Program RHL serta mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi penguatan kelembagaan masyarakat.

Analisis tingkat partisipasi dilakukan menggunakan metode skoring dengan skala Likert empat tingkat. Skor 1 menunjukkan responden tidak pernah berpartisipasi, skor 2 menunjukkan kurang berpartisipasi, skor 3 menunjukkan berpartisipasi, dan skor 4 menunjukkan sangat aktif berpartisipasi (Sugiyono, 2019). Nilai pada setiap indikator dijumlahkan untuk memperoleh skor total pada masing-masing tahapan partisipasi. Selanjutnya, tingkat partisipasi dihitung dengan membandingkan jumlah skor yang diperoleh terhadap skor maksimum, kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase menggunakan rumus berikut.

$$\text{Tingkat Partisipasi} = \frac{\text{Jumlah Skor yang diperoleh}}{\text{Skor Maksimum}} \times 100\%$$

Sumber : Syifa Rohimah dkk, 2019.

Persentase yang diperoleh selanjutnya dikelompokkan ke dalam kategori rendah (0-33%), sedang (34-66%), dan tinggi (67-100%) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi Tingkat Partisipasi

Persentase	Kategori
0 – 33 %	Rendah
34 – 66 %	Sedang
67 – 100 %	Tinggi

Sumber : Arikunto, 2013

Perumusan strategi penguatan kelembagaan masyarakat dilakukan menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats) (Rangkuti, 2016). Faktor-faktor internal dan eksternal diperoleh dari hasil observasi, wawancara, kuesioner, serta dokumentasi. Setiap faktor kemudian diberikan bobot dan rating, selanjutnya disusun ke dalam matriks IFAS (Internal Factor Analysis Summary) dan EFAS (External Factor Analysis Summary). Hasil analisis

tersebut digunakan untuk menentukan posisi kelembagaan pada diagram SWOT, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan alternatif strategi SO (Strengths–Opportunities), WO (Weaknesses–Opportunities), ST (Strengths–Threats), dan WT (Weaknesses–Threats). Indikator partisipasi masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikator Partisipasi Masyarakat dalam Program RHL

Tahapan	Indikator
Perencanaan	Mengikuti rapat perencanaan kegiatan RHL, Memberikan usulan dalam kegiatan RHL, Ikut menentukan lokasi penanaman, Ikut menentukan jenis tanaman, Ikut menyusun rencana kegiatan
Pelaksanaan	Mengikuti kegiatan penanaman, Ikut merawat tanaman, Ikut kegiatan konservasi tanah dan air, Mengganti tanaman yang mati, Memantau tanaman rehabilitasi
Pemanfaatan Hasil	Memanfaatkan hasil tanaman, Memanfaatkan lahan rehabilitasi, Mengelola hasil tanaman, Hasil tanaman membantu ekonomi, Ikut dalam pembagian hasil

Evaluasi

Mengikuti rapat evaluasi kegiatan, Memberikan pendapat saat evaluasi, Menilai keberhasilan kegiatan, Memberi saran perbaikan kegiatan, Membahas masalah kegiatan rehabilitasi

Sumber : Cohen dan Uphoff (1980)**Hasil dan Diskusi****Partisipasi Masyarakat dalam Program RHL****Partisipasi Tahap Perencanaan**

Partisipasi kelembagaan masyarakat pada tahap perencanaan memperoleh hasil 63,12% dan tergolong dalam kategori sedang. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah berpartisipasi dalam proses perencanaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), yang meliputi keikutsertaan dalam rapat perencanaan, penyampaian usulan, penentuan lokasi penanaman, penentuan jenis tanaman, serta penyusunan rencana kegiatan. Meskipun demikian, keterlibatan aktif anggota dalam setiap indikator tersebut belum berlangsung secara merata. Sebagian besar proses perencanaan masih didominasi oleh pengurus kelompok, sedangkan sebagian anggota lainnya lebih banyak mengikuti keputusan yang telah disepakati dalam musyawarah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kondisi tersebut dipengaruhi oleh anggapan sebagian anggota bahwa proses perencanaan merupakan tanggung jawab pengurus kelompok. Selain itu, perbedaan tingkat pengetahuan dan pengalaman anggota mengenai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan menyebabkan tidak semua anggota memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapat atau usulan pada saat musyawarah. Kondisi tersebut diketahui bahwa tingkat partisipasi pada tahap perencanaan tidak hanya ditentukan oleh kesempatan untuk terlibat, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas, pemahaman, dan kepercayaan diri anggota dalam proses pengambilan keputusan (Cohen & Uphoff, 1980). Maka, dibutuhkan upaya guna meningkatkan kapasitas anggota melalui pembinaan dan pelibatan yang lebih aktif dalam setiap proses perencanaan agar rasa memiliki terhadap program semakin kuat serta mampu mendukung keberhasilan dan keberlanjutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Tanjung dkk, 2017).

Partisipasi Tahap Pelaksanaan

Partisipasi kelembagaan masyarakat pada tahap pelaksanaan memperoleh persentase sebanyak 79,37% dan tergolong dalam kategori tinggi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anggota Kelompok Tani Hutan terlibat dalam kegiatan penanaman, pemeliharaan tanaman, konservasi tanah dan air, penyulaman tanaman yang mati, serta pemantauan tanaman rehabilitasi. Tingginya keterlibatan masyarakat pada tahap ini mencerminkan bahwa pelaksanaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) telah

mendapat dukungan yang baik dari anggota kelompok. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, tingginya partisipasi masyarakat didorong oleh koordinasi yang berjalan baik antara ketua kelompok dan anggota sehingga setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Pendampingan yang diberikan oleh BPDAS Solo juga membantu anggota memahami teknik pelaksanaan rehabilitasi serta membantu menyakinkan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan. Di samping itu, masyarakat memandang bahwa keberhasilan rehabilitasi akan memberikan manfaat bagi keberlanjutan lahan yang mereka kelola dan berpotensi meningkatkan manfaat ekonomi pada masa mendatang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan kelompok, pendampingan yang berkelanjutan, dan manfaat yang dirasakan masyarakat sebagai faktor penting dalam mendorong tingginya partisipasi pada tahap pelaksanaan (Purwanti dkk, 2022). Oleh karena itu, upaya penguatan koordinasi kelompok dan keberlanjutan pendampingan perlu terus dipertahankan agar tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat tetap tinggi dalam mendukung keberhasilan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Sulistiyono & Nur, 2024).

Partisipasi Tahap Pemanfaatan Hasil

Partisipasi kelembagaan masyarakat tahap pemanfaatan hasil mendapatkan persentase sebesar 81,37% dan termasuk dalam kategori tinggi. Hasil tersebut diketahui bahwa masyarakat sudah memanfaatkan hasil dari kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan melalui pengelolaan lahan rehabilitasi, pemeliharaan tanaman, serta keterlibatan dalam pembagian hasil sesuai ketentuan kelompok. Tingginya tingkat partisipasi pada tahap pemanfaatan hasil diketahui bahwa masyarakat telah merasakan manfaat dari pelaksanaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), sehingga mendorong mereka untuk tetap menjaga dan mengelola tanaman yang telah ditanam.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, manfaat yang dirasakan masyarakat terlihat dari tumbuhnya tanaman berkayu seperti jati dan mahoni yang memiliki nilai ekonomi serta manfaat ekologis. Meskipun hasilnya belum dapat dimanfaatkan dalam waktu dekat, masyarakat memandang tanaman tersebut sebagai aset jangka panjang yang dapat memberikan keuntungan pada masa mendatang. Selain itu, keberadaan tanaman rehabilitasi juga memberikan dampak positif terhadap kondisi lahan karena tutupan vegetasi menjadi lebih baik dan fungsi konservasi lahan

tetap terjaga. Manfaat yang dirasakan tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat tetap berpartisipasi dalam pemeliharaan dan pengelolaan lahan rehabilitasi secara berkelanjutan (Masithoh dkk., 2014). Oleh karena itu, pengelolaan hasil rehabilitasi perlu terus dipertahankan agar manfaat ekonomi jangka panjang dan manfaat ekologis dapat dirasakan secara berkesinambungan oleh masyarakat (Suhaeb et al, 2024).

Partisipasi pada Tahap Evaluasi

Partisipasi kelembagaan masyarakat tahap evaluasi memperoleh persentase sebesar 54,75% dan termasuk kategori sedang. Nilai tersebut merupakan tingkat partisipasi terendah dibandingkan tahapan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa terlibatnya masyarakat dalam kegiatan monitoring dan evaluasi masih relatif terbatas. Rendahnya keterlibatan pada tahap evaluasi mengindikasikan bahwa sebagian anggota kelompok masih memandang evaluasi sebagai tanggung jawab pengurus kelompok, sehingga partisipasi anggota dalam memberikan masukan dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan masih belum optimal. Padahal, evaluasi merupakan bagian penting dalam menilai capaian program dan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi kelembagaan masyarakat pada tahap evaluasi perlu dilakukan agar pelaksanaan program rehabilitasi hutan dan lahan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan (Tanjung dkk, 2017).

Tingkat Partisipasi Kelembagaan Masyarakat

Berdasarkan Tabel 3, tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat dalam Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Desa Sumberejo menunjukkan perbedaan pada setiap tahapan kegiatan.

Tabel 3. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program RHL

No	Tahapan Partisipasi	Jumlah Skor	Skor Mak-simum	Persen-tase	Kategori
1	Perencanaan	505	800	63,12%	Sedang
2	Pelaksanaan	635	800	79,37%	Tinggi
3	Pemanfaatan Hasil	651	800	81,37%	Tinggi
4	Evaluasi	438	800	54,75%	Sedang

Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal yang memengaruhi Kelembagaan Masyarakat

Matriks IFAS

Pemberian bobot dan rating pada setiap faktor internal didasarkan pada hasil observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner kepada responden. Bobot digunakan untuk mengetahui tingkat kepentingan masing-masing faktor dalam mendukung pelaksanaan

Partisipasi tertinggi terdapat pada tahap pemanfaatan hasil (81,37%) dan pelaksanaan (79,37%), sedangkan partisipasi pada tahap perencanaan (63,12%) dan evaluasi (54,75%) masih berada pada kategori sedang. Perbedaan tersebut diketahui bahwa masyarakat cenderung lebih aktif pada kegiatan yang memberikan manfaat secara langsung dibandingkan pada tahapan yang berkaitan dengan perencanaan dan evaluasi program (Purwanti dkk, 2022). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih aktif pada kegiatan yang memberikan manfaat secara langsung dibandingkan pada tahapan yang berkaitan dengan perencanaan dan evaluasi program (Nasikh, 2009).

Partisipasi yang tinggi pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan hasil memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan kegiatan rehabilitasi karena masyarakat terlibat secara langsung dalam penanaman, pemeliharaan, serta pengelolaan hasil rehabilitasi. Sebaliknya, partisipasi yang masih berada pada kategori sedang pada tahap perencanaan dan evaluasi menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan penilaian program masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kegiatan dapat terus diperbaiki sesuai dengan kebutuhan di lapangan (Tanjung dkk, 2017).

Oleh karena itu, peningkatan partisipasi tahap perencanaan dan evaluasi perlu menjadi perhatian melalui pelibatan anggota secara lebih aktif dalam musyawarah, penyusunan rencana kegiatan, serta evaluasi program. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat kelembagaan masyarakat sekaligus mendukung keberhasilan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara berkelanjutan (Sulistiyono & Nur, 2024).

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), sedangkan rating diberikan berdasarkan kondisi aktual yang ditemukan di lapangan. Faktor yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap keberhasilan program memperoleh bobot yang lebih tinggi, sementara rating mencerminkan tingkat kekuatan maupun kelemahan dari setiap faktor internal (Rangkuti, 2016).

Hasil analisis IFAS di Tabel 4, terlihat bahwa total skor kekuatan sebesar 1,82 lebih tinggi dibandingkan

total skor kelemahan sebesar 1,50. Temuan tersebut diketahui bahwa kondisi internal kelembagaan masyarakat di Desa Sumberejo lebih didominasi oleh faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan Program RHL dibandingkan faktor-faktor yang menghambat. Keaktifan anggota dalam kegiatan rehabilitasi, kerja sama antaranggota, pengalaman dalam kegiatan penanaman, serta kemampuan ketua kelompok dalam mengoordinasikan kegiatan menjadi faktor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kekuatan kelembagaan. Kondisi tersebut tercermin dari keterlibatan anggota dalam setiap tahapan kegiatan serta koordinasi kelompok yang berjalan dengan baik

sehingga pelaksanaan Program RHL dapat berlangsung secara efektif (Purwanti dkk, 2022).

Di sisi lain, pengetahuan sebagian anggota mengenai rehabilitasi hutan dan lahan yang masih terbatas, keterbatasan tenaga kerja, serta kegiatan kelompok yang belum dilaksanakan secara rutin menjadi faktor yang mengurangi kapasitas kelembagaan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas anggota melalui pelatihan, pembinaan, dan pendampingan masih diperlukan agar kemampuan kelembagaan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Program RHL dapat terus ditingkatkan (Sulistiyono & Nur, 2024).

Tabel 4. Matriks IFAS

No	Kekuatan (Strength)	Bobot	Rating	Skor
1	Kelompok tani aktif dalam kegiatan RHL	0,12	4	0,48
2	Kerja sama anggota kelompok baik	0,13	4	0,52
3	Anggota memiliki pengalaman menanam	0,10	4	0,40
4	Ketua kelompok mampu mengoordinasikan kegiatan	0,08	3	0,24
5	Anggota bersedia ikut kegiatan rehabilitasi	0,06	3	0,18
Sub Total		0,49	18	1,82
No	Kelemahan (Weakness)	Bobot	Rating	Skor
1	Partisipasi anggota masih rendah	0,10	3	0,30
2	Pengetahuan rehabilitasi masih kurang	0,14	4	0,56
3	Tenaga kerja kegiatan RHL terbatas	0,08	2	0,16
4	Kegiatan kelompok belum berjalan rutin	0,10	3	0,30
5	Pengelolaan kelompok masih kurang baik	0,09	2	0,18
Sub Total		0,51	14	1,50
Total		1,00	32	3,32

Matriks EFAS

Pemberian bobot dan rating pada setiap faktor eksternal didasarkan pada hasil observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner kepada responden. Bobot menunjukkan tingkat pengaruh setiap faktor eksternal terhadap pelaksanaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), sedangkan rating menunjukkan kemampuan kelembagaan masyarakat dalam memanfaatkan peluang maupun menghadapi ancaman yang terdapat di lingkungan eksternal (Rangkuti, 2016).

Hasil analisis EFAS pada Tabel 5 menunjukkan bahwa total skor peluang sebesar 1,80 lebih tinggi dibandingkan total skor ancaman sebesar 1,46. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kondisi eksternal di Desa Sumberejo masih memberikan peluang yang lebih besar dibandingkan ancaman dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Program RHL. Bantuan bibit dari pemerintah, pendampingan dari BPDAS Solo, serta ketersediaan lahan rehabilitasi menjadi faktor eksternal yang memberikan pengaruh besar terhadap keberhasilan program karena mendukung pelaksanaan

kegiatan rehabilitasi sejak tahap penanaman hingga pemeliharaan. Selain itu, peluang peningkatan kapasitas anggota melalui kegiatan pendampingan juga memperkuat kemampuan kelembagaan masyarakat dalam mengelola Program RHL secara berkelanjutan (Sulistiyono & Nur, 2024).

Di sisi lain, berkurangnya dukungan sebagian masyarakat, kondisi cuaca yang berubah - ubah, serta serangan hama dan penyakit tanaman menjadi faktor yang berpotensi menghambat keberhasilan Program RHL. Faktor - faktor tersebut dapat memengaruhi pertumbuhan tanaman, mengurangi efektivitas pelaksanaan kegiatan, dan meningkatkan risiko kegagalan rehabilitasi apabila tidak diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan, pendampingan yang berkelanjutan, serta upaya pengelolaan risiko agar kelembagaan masyarakat mampu beradaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi selama pelaksanaan Program RHL (Purwanti dkk, 2022).

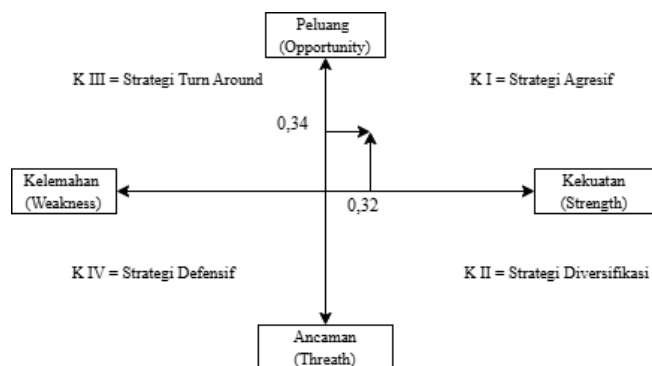
Tabel 5. Matriks EFAS

No	Peluang (Opportunity)	Bobot	Rating	Skor
1	Program RHL dari pemerintah membantu kegiatan kelompok	0,09	3	0,27
2	Adanya bantuan bibit dari pemerintah	0,13	4	0,52
3	Adanya pendampingan dari instansi terkait	0,11	3	0,33
4	Lahan rehabilitasi masih tersedia	0,13	4	0,52
5	Kegiatan RHL dapat meningkatkan ekonomi masyarakat	0,08	2	0,16
Sub Total		0,54	16	1,80
No	Ancaman (Threat)	Bobot	Rating	Skor
1	Cuaca tidak menentu mempengaruhi tanaman	0,11	4	0,44
2	Hama dan penyakit tanaman menjadi kendala	0,09	2	0,18
3	Kurangnya dukungan sebagian masyarakat	0,13	4	0,52
4	Tanaman rusak karena ternak	0,07	2	0,14
5	Bantuan pemerintah masih terbatas	0,06	3	0,18
Sub Total		0,46	15	1,46
Total		1,00	30	3,26

Kuadran SWOT

Berdasarkan posisi pada diagram Kartesius Gambar 1, yang diperoleh dari hasil perhitungan matriks IFAS dan EFAS, nilai sumbu X sebesar 0,32 dan sumbu Y sebesar 0,34 menempatkan kelembagaan masyarakat dalam Program RHL di Desa Sumberejo pada Kuadran I (growth oriented strategy). Posisi ini menunjukkan bahwa kelompok memiliki kekuatan internal yang lebih besar dibandingkan kelemahannya serta peluang eksternal yang lebih besar dibandingkan ancaman yang dihadapi.

Posisi pada Kuadran I mengindikasikan bahwa kelompok memiliki kemampuan untuk memanfaatkan kekuatan yang dimiliki guna mengoptimalkan berbagai peluang yang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa organisasi berada pada posisi yang mendukung pengembangan kelembagaan melalui pemanfaatan kekuatan internal dan peluang eksternal yang tersedia (Rino dkk, 2025). Oleh karena itu, strategi yang direkomendasikan adalah strategi pertumbuhan yang berorientasi pada pemanfaatan kekuatan internal untuk mendukung pengembangan kelembagaan dan peningkatan keberhasilan pelaksanaan Program RHL secara berkelanjutan.



Gambar 1. Diagram Kartesius

Perumusan Strategi Penguatan Kelembagaan Masyarakat dalam Program RHL

Matriks SWOT

Berdasarkan hasil identifikasi faktor internal dan eksternal, diperoleh empat alternatif strategi penguatan kelembagaan masyarakat dalam Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Desa Sumberejo, yaitu strategi SO (Strength-Opportunity), WO (Weakness-Opportunity), ST (Strength-Threat), dan WT (Weakness-Threat). Alternatif strategi tersebut disusun melalui kombinasi faktor-faktor yang diperoleh dari analisis IFAS dan EFAS yang dapat dilihat tabel 6.

Strategi SO dirumuskan dengan memanfaatkan kekuatan kelompok, seperti keaktifan anggota, kerja sama kelompok, pengalaman dalam kegiatan rehabilitasi, dan kemampuan koordinasi kelompok untuk mengoptimalkan peluang yang tersedia berupa bantuan bibit, pendampingan instansi terkait, ketersediaan lahan rehabilitasi, serta peluang peningkatan ekonomi masyarakat. Strategi yang dihasilkan meliputi peningkatan partisipasi anggota dalam kegiatan rehabilitasi, penguatan kerja sama kelompok dalam pengelolaan lahan rehabilitasi, serta optimalisasi pendampingan untuk meningkatkan kapasitas kelompok. Pemanfaatan kekuatan kelompok dan dukungan eksternal diketahui mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (Purwanti dkk, 2022).

Strategi WO disusun dengan memanfaatkan peluang eksternal untuk mengatasi kelemahan internal kelompok. Strategi yang dihasilkan antara lain peningkatan kapasitas anggota melalui pelatihan dan pendampingan, pemanfaatan dukungan pemerintah untuk penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi, serta penguatan sistem pengelolaan kelompok agar lebih efektif. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui

pelatihan dan pendampingan merupakan upaya penting dalam memperkuat kelembagaan dan mendukung keberhasilan rehabilitasi lahan (Sulistiyono & Nur, 2024).

Strategi ST dirumuskan dengan memanfaatkan kekuatan kelompok untuk menghadapi ancaman yang berpotensi menghambat pelaksanaan program. Strategi yang dihasilkan meliputi peningkatan koordinasi kelompok dalam menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu, penguatan kerja sama dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan kegiatan rehabilitasi. Kerja sama kelompok dan koordinasi yang baik diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan

sumber daya hutan secara berkelanjutan (Horota dkk, 2018).

Strategi WT difokuskan pada upaya meminimalkan kelemahan dan mengurangi dampak ancaman yang dihadapi kelompok. Strategi ini dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas anggota, perbaikan tata kelola kelembagaan, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi. Perbaikan tata kelola kelembagaan dan peningkatan kapasitas anggota dapat mendukung efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi lahan (Pujasari dkk, 2025). Keempat alternatif strategi tersebut menjadi dasar dalam penentuan strategi prioritas penguatan kelembagaan masyarakat dalam Program RHL di Desa Sumberejo.

Tabel 6. Matriks SWOT

Internal /Eksternal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	1. Kelompok tani aktif dalam kegiatan RHL 2. Kerja sama anggota kelompok baik 3. Anggota memiliki pengalaman menanam 4. Ketua kelompok mampu mengkoordinasikan kegiatan 5. Anggota bersedia ikut kegiatan rehabilitasi	1. Partisipasi anggota masih rendah 2. Pengetahuan rehabilitasi masih kurang 3. Tenaga kerja kegiatan RHL terbatas 4. Kegiatan kelompok belum berjalan rutin 5. Pengelolaan kelompok masih kurang baik
Peluang (O)	Strategi (S - O)	Strategi (W - O)
1. Program RHL dari pemerintah membantu kegiatan kelompok 2. Adanya bantuan bibit dari pemerintah 3. Adanya pendampingan dari instansi terkait 4. Lahan rehabilitasi masih tersedia 5. Kegiatan RHL dapat meningkatkan ekonomi masyarakat	1. Mengoptimalkan pelaksanaan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) melalui partisipasi aktif anggota kelompok dan koordinasi yang baik dari ketua kelompok sehingga dukungan program pemerintah dapat dimanfaatkan secara maksimal. 2. Memanfaatkan pengalaman anggota dalam kegiatan penanaman untuk meningkatkan keberhasilan pemanfaatan bantuan bibit yang diberikan pemerintah dalam kegiatan rehabilitasi lahan. 3. Memperkuat kapasitas kelembagaan kelompok melalui kerja sama antaranggota dengan memanfaatkan pendampingan dan pembinaan dari instansi terkait. 4. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan rehabilitasi yang masih tersedia melalui keterlibatan aktif anggota dalam kegiatan rehabilitasi secara berkelanjutan. 5. Mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui keberhasilan kegiatan rehabilitasi yang didukung oleh partisipasi anggota dan dukungan program pemerintah.	1. Meningkatkan pengetahuan anggota mengenai rehabilitasi hutan dan lahan melalui pelatihan dan pendampingan teknis yang diberikan oleh instansi terkait. 2. Meningkatkan partisipasi anggota dalam kegiatan kelompok melalui pemanfaatan program RHL yang memberikan manfaat bagi masyarakat. 3. Mengatasi keterbatasan tenaga kerja dengan mengoptimalkan dukungan program pemerintah dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi. 4. Memperbaiki sistem pengelolaan kelompok melalui pembinaan kelembagaan yang difasilitasi oleh instansi terkait agar kegiatan rehabilitasi berjalan lebih efektif. 5. Meningkatkan keberlanjutan kegiatan rehabilitasi dengan memanfaatkan potensi manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat dari keberhasilan program rehabilitasi
Ancaman (T)	Strategi (S - T)	Strategi (W - T)
1. Cuaca tidak menentu mempengaruhi tanaman	1. Memanfaatkan pengalaman anggota dalam kegiatan penanaman untuk menerapkan teknik budidaya yang sesuai dalam menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu.	1. Meningkatkan kapasitas anggota melalui pelatihan teknis rehabilitasi guna menghadapi dampak perubahan cuaca terhadap pertumbuhan tanaman.

2. Hama dan penyakit tanaman menjadi kendala	2. Meningkatkan kegiatan pemeliharaan tanaman melalui kerja sama anggota kelompok guna meminimalkan risiko serangan hama dan penyakit tanaman.	2. Meningkatkan kemampuan anggota dalam pemeliharaan tanaman untuk mengurangi risiko kerusakan akibat hama dan penyakit.
3. Kurangnya dukungan sebagian masyarakat	3. Memanfaatkan kemampuan ketua kelompok dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan dukungan terhadap kegiatan rehabilitasi.	3. Meningkatkan partisipasi anggota dan memperkuat komunikasi kelompok untuk memperoleh dukungan masyarakat terhadap kegiatan rehabilitasi.
4. Tanaman rusak karena ternak	4. Mengoptimalkan partisipasi anggota dalam kegiatan pengawasan dan pemeliharaan tanaman untuk mengurangi kerusakan akibat gangguan ternak.	4. Menyusun pembagian tugas dan jadwal pemeliharaan yang jelas guna mengatasi keterbatasan tenaga kerja serta meminimalkan kerusakan tanaman akibat gangguan ternak.
5. Bantuan pemerintah masih terbatas	5. Memperkuat kemandirian kelompok melalui pemanfaatan sumber daya dan kerja sama internal kelompok guna mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.	5. Memperkuat tata kelola dan kemandirian kelompok agar kegiatan rehabilitasi tetap berjalan meskipun dukungan bantuan pemerintah terbatas.

Strategi Penguatan Kelembagaan Masyarakat dalam Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Berdasarkan hasil analisis IFAS, EFAS, posisi kuadran SWOT, dan matriks SWOT, strategi yang diprioritaskan dalam penguatan kelembagaan masyarakat pada Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Desa Sumberejo adalah strategi SO (Strength-Opportunity). Strategi ini dipilih karena hasil analisis menunjukkan bahwa kelembagaan masyarakat berada pada Kuadran I, yang mengindikasikan bahwa kelompok memiliki kekuatan internal dan peluang eksternal yang lebih besar dibandingkan kelemahan dan ancaman yang dihadapi.

Strategi SO yang dirumuskan meliputi peningkatan partisipasi anggota kelompok dalam kegiatan rehabilitasi melalui pemanfaatan bantuan bibit pemerintah dan pendampingan dari instansi terkait, penguatan kerja sama antaranggota kelompok dalam pengelolaan lahan rehabilitasi, serta optimalisasi pengalaman anggota dalam kegiatan penanaman untuk meningkatkan keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan. Selain itu, kemampuan kelompok dalam melakukan koordinasi perlu dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah dan pihak terkait sehingga berbagai peluang yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Strategi tersebut dinilai mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui penguatan kerja sama anggota dan optimalisasi peran kelompok dalam pelaksanaan Program RHL (Rino dkk, 2025).

Penerapan strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mengelola kegiatan rehabilitasi secara lebih efektif dan berkelanjutan. Penguatan kelembagaan juga mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan karena meningkatkan kemampuan masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan kondisi lingkungan dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia (Ramachandra et al, 2025).

Dengan meningkatnya kapasitas kelembagaan, kelompok diharapkan mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan rehabilitasi secara lebih optimal sehingga tujuan rehabilitasi hutan dan lahan dapat tercapai dengan baik. Selain itu, strategi SO juga berpotensi meningkatkan manfaat ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan hasil rehabilitasi dan pengelolaan lahan yang lebih produktif sehingga keberlanjutan Program RHL dapat terus terjaga. Kondisi tersebut sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya ketahanan kelembagaan dan partisipasi masyarakat sebagai faktor utama dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan wilayah dan sumber daya alam (Awfa et al, 2025). Peningkatan manfaat ekonomi masyarakat dari hasil rehabilitasi dapat mendorong keberlanjutan partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (Pujasari dkk, 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Desa Sumberejo cenderung tinggi pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan hasil, sedangkan pada tahap perencanaan dan evaluasi masih berada pada kategori sedang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masyarakat lebih terdorong untuk terlibat pada kegiatan yang memberikan manfaat secara langsung dibandingkan pada tahapan pengambilan keputusan dan penilaian program. Temuan tersebut selaras dengan hasil analisis SWOT yang menunjukkan bahwa kelembagaan masyarakat memiliki kekuatan internal yang lebih dominan dibandingkan kelemahan, terutama berupa keaktifan kelompok, kerja sama antaranggota, pengalaman dalam kegiatan rehabilitasi, serta kesediaan anggota untuk berpartisipasi dalam kegiatan RHL. Di sisi lain, masih ditemukannya partisipasi yang belum optimal pada tahap perencanaan dan evaluasi menunjukkan adanya kelemahan kelembagaan yang perlu diperbaiki, seperti keterlibatan anggota yang belum merata, keterbatasan pengetahuan rehabilitasi,

dan pengelolaan kelompok yang belum berjalan secara optimal. Didukung oleh peluang eksternal berupa bantuan bibit, pendampingan instansi terkait, serta ketersediaan lahan rehabilitasi, kelembagaan masyarakat berada pada Kuadran I (growth oriented strategy). Oleh karena itu, strategi SO menjadi prioritas dalam penguatan kelembagaan melalui peningkatan partisipasi anggota, penguatan kerja sama kelompok, optimalisasi pendampingan, serta pemanfaatan dukungan pemerintah secara berkelanjutan. Keberhasilan strategi tersebut didukung oleh keterlibatan masyarakat dan dukungan pemerintah yang saling berinteraksi dalam menunjang keberhasilan upaya adaptasi (Suhaeb dkk, 2024). Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat pada seluruh tahapan kegiatan sekaligus mendukung keberlanjutan Program RHL di Desa Sumberejo.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat dalam Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Desa Sumberejo tergolong tinggi pada tahap pelaksanaan (79,37%) dan pemanfaatan hasil (81,37%), sedangkan pada tahap perencanaan (63,12%) dan evaluasi (54,75%) masih berada pada kategori sedang. Hasil analisis IFAS menunjukkan bahwa total skor kekuatan sebesar 1,82 lebih tinggi dibandingkan total skor kelemahan sebesar 1,50, yang mengindikasikan bahwa kelembagaan masyarakat memiliki kondisi internal yang relatif kuat dalam mendukung pelaksanaan Program RHL. Sementara itu, hasil analisis EFAS menunjukkan bahwa total skor peluang sebesar 1,80 lebih tinggi dibandingkan total skor ancaman sebesar 1,46, sehingga lingkungan eksternal dinilai cukup mendukung penguatan kelembagaan masyarakat. Hasil analisis SWOT menempatkan kelembagaan masyarakat pada Kuadran I dengan koordinat (0,32; 0,34), yang menunjukkan bahwa kekuatan internal dan peluang eksternal lebih dominan dibandingkan kelemahan dan ancaman. Oleh karena itu, strategi prioritas yang direkomendasikan adalah strategi SO (Strength-Opportunity) melalui pemanfaatan kekuatan internal untuk mengoptimalkan peluang yang tersedia guna meningkatkan kapasitas kelembagaan dan mendukung keberlanjutan Program RHL di Desa Sumberejo.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Solo, Pemerintah Desa Sumberejo, Bapak Sutanto selaku ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Desa Sumberejo, serta seluruh anggota KTH di Desa Sumberejo yang telah memberikan dukungan dan membantu proses

pengumpulan data penelitian. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Aziz Akbar Mukasyaf, S.Hut., M.Sc., Ph.D. selaku dosen pembimbing serta Bapak Danardono, S.Si., M.Sc. dan Bapak Afif Ari Wibowo, S.Si., M.Sc. selaku dosen penguji atas arahan, masukan, dan saran yang diberikan dalam penyempurnaan penelitian ini.

Referensi

- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=557184>
- Arsyad, S. 2010. *Konservasi Tanah dan Air*. Edisi Kedua Cetakan Kedua. IPB Press. Bogor. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/42667>
- Awfa, D., Sahid, S., Yanto, N. P., Aziz, F., Rahmattullah, R., & Silalahi, A. T. (2025). Tourism destination resilience as a key for sustainable tourism development in Pesisir Barat Regency, Lampung Province, Indonesia. *Forum Geografi*, 39(2), 209-221. <https://doi.org/10.23917/forgeo.v39i2.7907>
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development*, 8(3), 213-235. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(80\)90011-X](https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90011-X)
- Horota, F. T., Nugroho, B., & Marwa, J. (2018). Kelembagaan masyarakat dalam pengembangan program perhutanan sosial di Kabupaten Manokwari. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 15(2), 95-108. <https://doi.org/10.46703/jurnalpapuasia.Vol4.Iss2.9>
- Kartodihardjo, H. (2013). *Kelembagaan pengelolaan sumber daya alam*. Bogor: IPB Press. repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/65538/1/13.%20MODULE%20PELATIHAN%20Kelembagaan%20Pengelolaan%20SDA.pdf
- Masithoh, S., Miftah, H., & Aina, A. (2014). Partisipasi Anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. <https://doi.org/10.30997/jagi.v2i1.766>
- Nasikh. (2009). *Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Hutan di Kawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) Pasuruan Jawa Timur*. <https://journal.unair.ac.id/MKP@partisipasi-masyarakat-pada-pengelolaan-hutan-di-kawasan-gerakan-rehabilitasi-hutan-dan-lahan>

- (gerhan)-pasuruan-jawa-timur--article3113-media-15-category-8.html
- Ohiwal, S., Sitania, F., & Mustamu, R. (2023). Peran masyarakat adat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Desa Buano Utara Kabupaten Seram Bagian Barat. *Jurnal Kehutanan Papua*, 9(1), 21–32. <https://doi.org/10.54035/agrosains.v16i2.388>
- Pujasari, G., Fajarwati, D., Qoyum, C. A., Hanafi, Y., Firmansyah, H., & Prihatono, R. (2025). Analisis kebijakan rehabilitasi lahan melalui pembangunan hutan rakyat pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I Bogor. *Jurnal ForestIndo (Journal of Indonesian Forestry)*, 2(1), 272–285. <https://journal.ipb.ac.id/forestrindo-journal/article/view/64932>
- Purwanti, N., Rahim, S., & Hamidun, M. S. (2022). Partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Agrosains*, 16(2), 123–131. <https://doi.org/10.29303/jbl.v5i1.849>
- Ramachandra, T. V., Negi, P., Mondal, T., & Setturu, B. (2025). Sustainable management of natural resources at disaggregated levels with insights from landscape dynamics. *Forum Geografi*, 39(2), 136–162. <https://doi.org/10.23917/forgeo.v39i2.6857>
- Rangkuti, F. (2016). Analisis SWOT: Teknik membedah kasus bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=UHV8Z2SE57EC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Rino, M., Aryadi, M., & Abidin, Z. (2025). Strategi pengelolaan program perhutanan sosial di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Sengayam. *Jurnal Kehutanan Tropika*, 13(1), 45–56. <https://dx.doi.org/10.20527/jht.v13i1.22176>
- Rohimah, S., Ilham, M., & Lukman, S. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Visioner: Jurnal Pemerintahan*, 11(5), 821–833. <https://doi.org/10.54783/jv.v11i1%605.248>
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta. <https://archive.org/details/buku-metode-penelitian-sugiyono/page/n9/mode/1up>
- Suhaeb, F. W. ., Tamrin, S. ., Jumadi, & Irwan. (2024). Community Adaptation Strategies To Climate Change: Towards Sustainable Social Development. *Migration Letters*, 21(S2), 943–953. <https://migrationletters.com/index.php/ml/article/view/7017>
- Sulistyono, S., & Nur, S. H. (2024). Pendampingan masyarakat memulihkan lahan kritis pada Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS Citarum. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(1), 62–79. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v7i01.9280>
- Tanjung, N. S., Sadono, D., & Wibowo, C. T. (2017). Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan nagari di Sumatera Barat. *Jurnal Penyuluhan*, 13(1). <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v13i1.12990>